

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada pelayanan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
4. Pembetulan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
5. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
6. Rekomendasi SIP Tenaga Kesehatan selain Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
7. Pembetulan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan selain Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis
8. Pencabutan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan selain Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis
9. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
10. Pencabutan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
12. Sertifikat Laik Schat (SLS)
13. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
14. Penyuluhan Keamanan Pangan PIRT (PKP-PIRT)
15. Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKP-SS)
16. Pendaftaran Kepesertaan Program Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
17. Klaim Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Klaim 24 Jam Pertama PSC 119 YES
18. Pelayanan Kegawatdaruratan pra Rumah Sakit

KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan mengacu pada masing-masing kategori.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2023, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 September 2024

